

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah beserta analisa yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka peneliti mampu kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi Program Kang Pisman di Kecamatan Kiaracondong sudah terlaksana. Dibuktikan melalui upaya-upaya baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Bandung, dan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong. Namun implementasi ini masih kurang baik, karena dampak yang dihasilkan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain itu, pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan Program di Kecamatan Kiaracondong masih rendah, dan mengakibatkan partisipasi yang rendah pula. Untuk mengetahui secara jelas tiap faktor nya, ditunjukkan dibawah ini;

1. Faktor Sosial Politik

Berkaitan dengan faktor sosial politik, pelaksanaan Program Kang Pisman oleh Pemerintah Kecamatan Kiaracondong ini masih kurang baik. Dibuktikan melalui data dan fakta yang ditemukan oleh peneliti. Walaupun Kecamatan Kiaracondong sudah memiliki rencana kerja Program Kang Pisman dari Eksum *Masterplan* Persampahan Kota Bandung, namun upaya sosialisasi dan upaya pelatihan keterampilan masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pemanfaatan sampah masih kurang. Ini dibuktikan melalui hasil wawancara peneliti bersama masyarakat yang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi Program Kang Pisman dan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah yang dilakukan baru terlaksana secara maksimal untuk masyarakat Kelurahan

Babakan Sari, sementara masyarakat kelurahan lainnya belum mendapatkan secara maksimal.

2. Faktor Finansial

Berkaitan dengan faktor finansial dalam pelaksanaan Program Kang Pisman di Kecamatan Kiaracondong, cukup baik. Dibuktikan melalui sudah terdapatnya dokumen anggaran untuk pelaksanaan Program Kang Pisman di Kecamatan Kiaracondong, yang menunjukkan anggaran operasional Program Kang Pisman, dan anggaran pemeliharaan sarana prasarana Program Kang Pisman di Kecamatan Kiaracondong. Selain hal ini, serapan anggaran dari Program Kang Pisman juga sudah baik. Dibuktikan melalui hasil studi dokumen anggaran di Kecamatan yang menunjukkan bahwa sebanyak 85,32% anggaran sudah terserap hingga akhir tahun 2019. Namun data ini juga masih berbeda dengan keadaan di lapangan dimana kegiatan sosialisasi Program masih kurang dan baru sering terlaksana di satu Kelurahan saja. Untuk pelatihan keterampilan pun baru terlaksana di dua kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggran belum efisien dan efektif, karena dampak yang dihasilkan di masyarakat masih belum terlihat.

3. Faktor Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

Berkaitan dengan faktor ini, pemerintah Kecamatan Kiaracondong sudah melakukan koordinasi secara baik dan rutin dengan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, dan Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong. Dibuktikan melalui rencana kerja yang terdapat di DLHK dengan Kecamatan Kiaracondong memiliki kesamaan. Selain itu koordinasi rutin yang dilakukan DLHK dengan Kecamatan Kiaracondong juga berupa rapat rutin

antara pihak kecamatan dengan tim pendamping dari DLHK mengenai hasil pelaksanaan Program Kang Pisman. Kecamatan juga terus berkoordinasi secara rutin dengan pihak kelurahan melalui pelaporan rutin dari kelurahan ke kecamatan. Adapun koordinasi antara pihak kecamatan dengan organisasi non-pemerintah masih rendah. Dibuktikan melalui tidak adanya koordinasi dalam bentuk apapun yang dilakukan antara Kecamatan Kiaracondong dengan organisasi non-pemerintah di wilayah Kecamatan Kiaracondong. Selain itu, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dengan masyarakat masih minim. Dibuktikan melalui data dan fakta yang ditemukan peneliti yang menunjukkan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna dan LPM, baru terlaksana rutin di satu kelurahan saja yaitu Kelurahan Babakan Sari, sementara kelurahan lain belum rutin dan berkelanjutan.

4. Faktor Keberadaan Organisasi Non-Pemerintah (NGO).

Berkaitan dengan faktor ini, di Kecamatan Kiaracondong sendiri belum terdapat koordinasi atau bahkan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau masyarakat dalam rangka sosialisasi Program Kang Pisman. Bukti ini juga menguatkan bahwa memang dalam pelaksanaan Program Kang Pisman, baik yang dilaksanakan oleh DLHK maupun Kecamatan Kiaracondong, belum melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah. Hubungan atau koordinasi yang sudah dilakukan saat ini baru di DLHK, itu pun tidak secara rutin dan tidak sistematis. Di Kecamatan Kiaracondong bahkan hanya melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna dan LPM. Belum ada dukungan maupun inisiasi dari pihak kecamatan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat dalam rangka implementasi Program Kang Pisman kepada masyarakat.

5. Faktor Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan faktor ini, di Kecamatan Kiaracondong sendiri terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah masih rendah. Dari 6 kelurahan yang ada, baru ada 1 satu kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari yang partisipasi masyarakatnya dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah sudah cukup baik dan tersistematis. Hal ini dibuktikan dari aktifnya peran masyarakat dalam pemilahan baik di tingkat rumah maupun TPS dan juga pemanfaatan di rumah maupun TPS. Sementara di 5 Kelurahan lain, terlihat bahwa peran masyarakat dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah masih pasif. Belum ada dukungan seperti pelaksanaan pengelolaan sampah maupun kontribusi lain yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kang Pisman di wilayah masing-masing.

6. Faktor Limbah

Berkaitan dengan faktor ini, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 3 jenis yaitu jenis organik, anorganik, dan residu. Jumlah sampah yang dihasilkan adalah sebesar 53,3 ton per hari dengan sumbangan terbesar di sampah anorganik. Dalam upaya pengurangan sampah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya, pihak Kecamatan Kiaracondong sudah melakukan upaya pemilahan dan pemanfaatan sampah seperti contohnya sudah ada regulasi tentang kewajiban untuk memilah sampah bagi masyarakat dan TPS di beberapa Kelurahan. Kemudian dalam pemanfaatannya, pihak Kecamatan Kiaracondong sudah bekerja sama dengan DLHK melalui tim pendampingan. Contoh upaya yang dilakukan adalah mengelola bank sampah di Kelurahan Babakan Sari dan Cicaheum,

juga memiliki pemanfaatan sampah organik seperti komposter di TPS Kelurahan Babakan Sari. Namun upaya ini baru terlaksana di satu kelurahan, sedangkan kelurahan lain belum terlaksana secara maksimal. Terkait dengan upaya yang dilakukan masyarakat pun menunjukkan hal yang serupa, dimana upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat masih minim dan baru terlaksana pada masyarakat di Kelurahan Babakan Sari dan Cicaheum, sementara yang lain belum terlaksana.

6.2. Rekomendasi

Setelah memahami proses beserta permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi bagi pihak Kecamatan Kiaracondong dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan meningkatkan dampak implementasi Program Kang Pisman dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kiaracondong. Diantaranya;

1. Meningkatkan peran kelurahan dalam mensosialisasikan Program Kang Pisman melalui cara-cara baru dan melibatkan organisasi kemasyarakatan juga pelatihan keterampilan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kelurahan.
2. Meningkatkan pengawasan serapan anggaran terhadap kegiatan, agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berdampak pada pelaksanaan program dan bagi masyarakat.
3. Kecamatan Kiaracondong perlu melakukan inisiasi untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat di tiap kelurahan dalam pelaksanaan Program Kang Pisman di Kecamatan Kiaracondong, agar upaya sosialisasi dan pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.

4. Memperkuat regulasi di tingkat kelurahan, terutama tentang regulasi yang memaksa masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPS. Adapun regulasi ini perlu diterapkan di tiap kelurahan agar dampak yang dihasilkan efektif.
5. Melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dalam pemanfaatan sampah di TPS Kelurahan terutama kelurahan yang TPS nya belum baik, agar proses pemanfaatan menjadi lebih efisien dan berdampak bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Aboejoewono, A. (2005). *Pengelolaan Limbah Menuju Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya; Studi Kasus DKI Jakarta*. Jakarta.
- Amasuomo, E., & Baird, J. (2016). *The Concept of Waste and Waste Management*. *Journal of Management and Sustainability*, 6(4), 88-96.
- Azwar, A. (2009). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Cresswell, J.H. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Dye, T. R. (2012). *Understanding Public Policy* (14th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Faisol, S., (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta
- Gaventa, J. & Valderrama, C. (1999) *Participation, Citizenship and Local Governance*. Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance, Institute of Development Studies.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Gruber, J. (2005). *Public Finance and Public Policy*. New York: Worth Publications.
- Kartikawan, Y. (2007). *Pengelolaan Sampah*. J, Lingkungan Hidup, Yogyakarta.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Luthfi, A., Kismini, E. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Sukoharjo Kabupaten Pati*.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: Sage Publications.

Muri, A. C. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana.

Mustafa, H. (2003). *Modul Metode Penelitian*. Bandung: Prodi Ilmu Administrasi Niaga FISIPOL UNPAR.

Randall, R. B., & Grace, F. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.

Suarna, I. W. (2008). *Model Permasalahan Sampah Perkotaan dan Pedesaan*. Universitas Udayana.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Yarianto dkk. (2005) *Perlu Paradigma Baru Pengelolaan Sampah*. Jakarta.

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: Sage.

Internet

Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2017. *Kecamatan Kiaracondong dalam Angka*. <https://bandungkota.bps.go.id/publication/2017/09/20/7d896436c26770d1963102fe/kecamatan-kiaracondong-dalam-angka-2017.html> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.22 WIB

Humas Kota Bandung. *Delapan Kelurahan Jadi Role Model Kawasan Bebas Sampah*. <http://humas.bandung.go.id/humas/layanan/2018-12-10/delapan-kelurahan-jadi-role-model-kawasan-bebas-sa> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.25 WIB

OECD. (2000). *Waste Prevention and Minimalisation*. <https://www.oecd.org/env/waste/prevention-minimisation.htm> Diakses Minggu, 20 Oktober 2019. 16.55 WIB

Open Data Kota Bandung. *Rata-Rata Produksi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Kota Bandung*. <http://data.bandung.go.id/dataset/rata-rata-produksi-sampah-berdasarkan-sumber-sampah-di-kota-bandung> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.16 WIB

Open Data Kota Bandung. *Produksi Jumlah Sampah Berdasarkan Jenisnya*. <http://data.bandung.go.id/dataset/produksi-jenis-sampah-menurut-jenisnya-tahun-2014> Diakses Senin 9 Desember 2019. 10.21 WIB.

Panduan Pelaksanaan Program Kang Pisman. <http://www.kangpisman.com/> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.40 WIB

Tempo. *Kang Pisman, Pilih dan Pilah Sampah Untuk Ciptakan Bandung Kota Zero Waste*. <https://nasional.tempo.co/read/1102023/kang-pisman-pilih-dan-pilah-sampah-untuk-ciptakan-bandung-kota-zero-waste> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.38 WIB

Tribun Jabar. *Produksi Sampah Kota Bandung Capai 1.600 ton per hari, 150 ton Diantaranya Plastik*. <http://jabar.tribunnews.com/2018/12/03/produksi-sampah-kota-bandung-capai-1600-ton-per-hari-150-ton-di-antaranya-plastik> Diakses Selasa, 5 Maret 2019. Pukul 16.14 WIB

Website Kang Pisman. <https://www.kangpisman.com/> Diakses 5 Desember 2019

Peraturan, Undang-Undang dan Dokumen Pemerintah

Dokumen Serapan Anggaran 2018 Kecamatan Kiaracondong

Eksum *Masterplan* Persampahan Kota Bandung.

Kecamatan Kiaracondong Dalam Angka 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung